

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kesetabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Melalui tujuan pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan yaitu dengan cara meningkatkan konsumsinya. Untuk mencapai tujuan itu peranan pemerintah sebagai 1) alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, 2) peranan distribusi pendapatan yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan merata dan 3) stabilisasi perekonomian yaitu pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya apabila berada pada disequilibrium. (Mangkoesbroto,2001; 20)

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah di Indonesia diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membantuk suatu pola kemitran antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad,lincolin:1999)

Sebagai sebuah organisasi atau Rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis (meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah yang berada di Negara-negara sedang berkembang), melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya, Dalam kasus ini pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta, Itulah sebabnya pemerintah melakukan berbagai pengeluaran bahkan dalam jumlah besar.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif, sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak

dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor- sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah. Hal inilah membuat pengeluaran ini disebut investasi pemerintah.

Menurut teori Keynesian, stimulus fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik belanja barang dan jasa, maupun belanja modal atau investasi dapat membantu menggerakkan sektor riil. Stimulus fiskal tersebut tercermin di APBN atau APBD khususnya pada pos pengeluaran, yang memang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah selama masih berada dalam batas - batas yang ditopang oleh penerimaan. Pemberian stimulus fiskal berupa insentif perpajakan; belanja Negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, serta meningkatkan daya beli aparatur daerah dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) pada pertumbuhan ekonomi memang tak bisa diabaikan, pangsa pengeluaran pemerintah pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari segi penggunaan di Kabupaten Karo sekitar 9 persen di tahun 2006. Sementara instrumen lain seperti konsumsi, investasi swasta dan ekspor neto masing-masing 26 persen, 24 persen dan 5 persen. Untuk itu masih perlu dioptimalkan. Namun tidak semua pengeluaran dikatakan berperan kepada pembangunan melainkan sebagian saja seperti belanja barang-barang modal dan belanja barang dan jasa.

Untuk mengoptimalkan pengeluaran, maka penyerapan anggaran yang tercermin dari belanja pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan sesuai sasaran dan tentunya didukung kuat oleh penerimaan. Beberapa langkah strategis harus dilakukan agar penyerapan anggaran memberi kontribusi besar bagi pembangunan nasional maupun daerah yaitu: Pelaksanaan program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran, bukan menghabiskan anggaran agar dikatakan berhasil menyerap dana yang tersedia. (Harian Ekonomi Neraca, 2008)

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$.

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional, dengan ini pula dapat di analisis seberapa pentingnya peranan pemerintah terhadap perekonomian nasional.

Sebagai identitas pendapatan nasional. Variable Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat, sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang (a) sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dengan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, dan (b) memberikan informasi dan

data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, yaitu: konsumsi, rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah dari sektor publik, menjadi subyek penting dan menarik untuk dianalisis karena sektor ini dapat menaikan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (long run steady state growth economy).

Fakta menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten bisa positif atau negatif, bukti dan hasilnya berbeda di setiap negara maupun di daerah. Sifat dari pengeluaran publik/pemerintah akan tergantung kondisinya (Barro,1990).

Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian lainnya bahwa kontribusi pengeluaran produktif positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya untuk pengeluaran tidak produktif hasilnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (folster dan Henrekson,1999)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ?

1.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dan masih perlu dikaji kebenarannya dengan menggunakan data yang mempunyai hubungan.

Dari permasalahan yang ada, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi, terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menambah pengetahuan penulis dan sebagai pelengkap salah satu syarat menyelesaikan kuliah di Fakultas ekonomi, jurusan ekonomi pembangunan khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah, Instansi/ lembaga yang terkait dalam menentukan kebijaksanaan dan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Karo.
4. Menambah hasil-hasil penelitian yang ada, khususnya mengenai pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi dan investasi.

5. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa/i Fakultas ekonomi Universitas Sumatera Utara khususnya mahasiswa/i jurusan ekonomi pembangunan